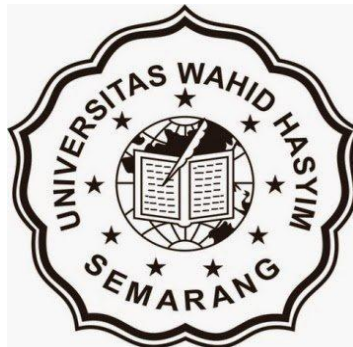


PENANAMAN MODAL ASING
DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
(UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
INDONESIA DALAM MENARIK INVESTOR ASING TAHUN 2016-2021)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Progam Studi Hubungan Internasional



Oleh :

Moch. Azmi Fuad Mahardhika

162020047

Progam Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

2020

PENANAMAN MODAL ASING
DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
(UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
INDONESIA DALAM MENARIK INVESTOR ASING TAHUN 2016-2021)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

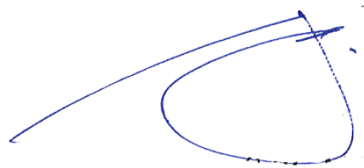
Oleh :

Moch. Azmi Fuad Mahardhika

162020047

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Dr. Ali Martin, S.IP., M.Si.

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

2020

1 HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan tim penguji

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2020




Jam ; 11.00 WIB

Tempat : Sidang Online

Skripsi ini benar-benar karya penyusun

Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan, Penyusun bersedia bertanggungjawab atas segala konsekuensinya.

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|--|
| 1. Dr. Ismiyatun, M.Si. Ketua Penguji | 1.  |
| 2. Dr. Ali Martin, S.IP., M.Si. Penguji Samping 1 | 2.  |
| 3. Anna Yulia Hartati, S.IP., M.A. Penguji Samping II | 3.  |

Semarang, 18 Agustus 2020

Mengetahui

Dean FISIP Unwahas



Agus Riyanto, S.IP., M.Si.

ABSTRAKSI

Tujuan penulisan ini untuk menganalisa Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik investor asing masuk ke daerah, disini pemerintah daerah melakukan fungsi *marketing strategy* untuk menarik investor. Fungsi *marketing strategy* dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak sebagai pemegang kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan yang bertugas untuk menarik dan menangani investor. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Demak menarik investor asing yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT) Kabupaten Demak.

Kata Kunci: Investor Asing, DINPMPTSP Kabupaten Demak

MOTTO

Knowledge is Weapon

Who Explain Well, Who Understand Well

Orang Lain Hanya Tau Cerita Sukses Kita, Bukan Perjuangan Kita

Maka Berdo'a dan Berusahalah !

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan :

1. Ibuku tercinta, Umi Asih Sumarsih yang dengan kasih sayangnya tiada henti kepada semua anaknya, umi adalah contoh teladan yang tak pernah mengeluh dalam kondisi seberat apapun, selalu memberikanku support dalam segala hal, apalagi ketika saya mengeluh dengan pekerjaan saya (terutama skripsi), beliau selalu mengingatkanku untuk cepat dikerjakan biar cepat lulus dan mendapatkan gelar Sarjana. Saya yakin Umi adalah wanita yang diRidhoi oleh Allah SWT. Semoga sehat, panjang umur, dan mendapat rezeki yang barokah. Aamiin
2. Untuk Bapak tersayang, Abah Martono yang selalu mencontohiku bagaimana apa arti sebuah kesabaran, selalu positif dan optimis jangan takut akan kegagalan. Terimakasih atas kebersaan dan keharmonisan berumahtangga. Semoga Abah sehat dan panjang umur. Aamiin
3. Untuk semua keluarga yang mendukung, menyemangati, dan menginspirasi. Mas Adhit, Dek Rama, Dek Alwy, Dek Nafi, Eyangti, Bu Endah, Mama Tata, Dek Daru, Om Mul, Dek Farhan aaku banyak belajar arti kehidupan dari mereka, bagaimana menjadi lelaki yang kuat baik jasmani dan rohani. Eyangti yang selalu mendoakan saya untuk menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mas Adhit yang selalu menasehati saya ketika dalam emosi tinggi untuk selalu meredam amarah. Tetaplah solid *be my part life*. Terima kasih sedalam-dalamnya *i do love pandawa's Family*.

4. Bu Ismiyatun Kajur FISIP yang baik hati sedia selalu membantu saya dalam mengalami kesulitan dalam perkuliahan. *Jazakallah Khoiron Katsiro* untuk segala ilmu dan pengalamannya.
5. Pak Ali martin dosen pembimbing saya baik hati jikalau bukan beliau yang membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini belum tentu saya menyelesaikan tepat waktu.
6. Teruntuk temen seperjuanganku Bu Dian dan Feri. Mereka adalah keluarga Hubungan Internasioanaku yang masih bertahan dan bareng-bareng pngen lulus tepat waktu.
7. Dan juga Niki dan Melinda (termasuk Bu dian dan Feri) dari awal bimbingan kita bareng-bareng di Seminar Proposal bareng sampai luluspun alhamdulillah *we all are clear! Guys. See you on top yeahhh*
8. Seluruh Dosen FISIP Unwahas terimakasih atas ilmunya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah puji syukur atas segala rahmat dan karunianya yang telah meridhoi segala upaya peneliti dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanaman Modal Asing Dalam Hubungan Internasional (Upaya Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Indonesia Menarik Investor Asing Tahun 2016-2021)” sebagai tugas akhir dalam pembelajaran program Sarjana Strata Satu (S1) Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Skripsi ini lahir dari ketertarikan penulis untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah terhadap potensi-potensi yang masuk dari sektor industri dan dalam menarik investor asing.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan Dosen Pembimbing Dr. Ali Martin, S.IP., M.Si. yang telah bersabar membimbing saya selama menulis penelitian ini. Begitu juga dengan Dosen Wali saya Pak Adi Joko, S.IP.,MA. Yang menuntun saya selama studi di Unwahas. Segenap keluarga FISIP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Tentu tulisan ini jauh dari kata sempurna. Karena itu semoga karya di masa depan menjadi lebih baik.

Semarang, 18 Agustus 2020



Moch. Azimi Fuad Mahardhika

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|---|
| PMA | = Penanaman Modal Asing |
| DINPMPTSP | = Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| MNC | = Multinational Corporation |
| BPMPTPT | = Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |
| VOC | = Verenigde Oost Indische Compaigne |
| PMDN | = Penanaman Modal Dalam Negeri |
| WNA | = Warga Negara Asing |
| WNI | = Warga Negara Indonesia |
| UPT-SA | = Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| SDM | = Sumber Daya Manusia |
| SWOT | = Strenght Weakness Opportunity Threath |
| PDRB | =Produk Domestik Regional Bruto |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAKSI | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Landasan Teori | 10 |
| E. Hipotesa | 11 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING | |
| A. Penanaman Modal Asing di Kabupaten Demak..... | 21 |
| B. Masalah Penanaman Modal Asing Kabupaten Demak | 23 |
| B.1. Keunggulan dalam Berinvestasi di Kabupaten Demak | 23 |
| B.2. Kelemahan yang Menjadi Tolak Ukur Berinvestasi di Kabupaten Demak | 24 |
| B.3. Peluang atau Potensi Berinvestasi di Kabupaten Demak ... | 26 |
| B.4. Hambatan dalam Berinvestasi di Kabupaten Demak | 27 |
| C. Sejarah Pembentukan DINPMPTSP Kabupaten Demak | 28 |
| D. Dasar Hukum DINPMPTSP | 30 |

| | |
|----------------------------------|----|
| E. Visi dan Misi DINPMPTSP | 31 |
| F. Tugas pokok DINPMPTSP | 32 |

**BAB III : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DALAM
MENARIK INVESTOR ASING**

| | |
|---|----|
| A. Perencanaan dan Pemograman Pada Dinas Penanaman Modal dan Peyalanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak | 34 |
| A.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang Pro Investasi | 34 |
| A.2 Fungsi Strategi Marketing oleh DINPMPTSP Kabupaten Demak | 38 |
| A.2.1. Image Marketing | 40 |
| A.2.2. Attraction Marketing | 47 |
| A.2.3. Infrastructure Marketing | 48 |
| A.2.4. People Marketing | 50 |
| B. Evaluasi Strategi Marketing Dinas Penanaman Modal dan Peyalanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak | 53 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 56 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi sumber daya yang melimpah, dari segi kekayaan alam serta jumlah penduduknya namun masih mengalami masalah dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru adalah melalui kegiatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing.

Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyesuaian hukum terkait penanaman modal, pemberian insentif perizinan dan non perizinan dan penghilangan hambatan hukum dan nonhukum dalam penanaman modal merupakan upaya yang dapat dan perlu terus dilakukan untuk dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang ada dan memenangkan persaingan yang ketat, dalam meningkatkan kegiatan penanaman modal.¹

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing yang sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu.

¹ David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta, kencana, 2013) hlm 1.

Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarah penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasional di Indonesia pada sekitar tahun 1511, dimana pada saat itu pada pedagang Eropa khususnya Portugis mulai menguasai Malaka dalam komoditas rempah-rempah yang mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu. Kegiatan perdagangan internasional tersebut berkembang terus menjadi kegiatan yang bersifat kolonialisme di wilayah Indonesia, bukan saja oleh bangsa Portugis, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lainnya, yaitu Belanda (tahun 1596- 1795 selanjutnya tahun 1816-1942), Perancis (1795-1811), Inggris (tahun 1811-1816) dan Jepang (tahun 1942-1945). Pada masa awal penjajahan Belanda kehadiran multinational company seperti Verenigde Oost Indische Compaigne (VOC) dalam kegiatan rempah-rempah di Indonesia juga memiliki peranan sangat penting, khususnya dalam merepresentasikan kepentingan pemerintah Kerajaan Belanda. Selanjutnya kegiatan penanaman modal asing di zaman kolonialisme juga semakin berkembang agresif sejak diundangnya Agrarische Wet pada tahun 1870 oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang ditandai dengan berkembangnya perkebunan besar di wilayah Indonesia.

Setelah kemerdekaan nasional keberadaan penanaman modal asing

di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949) masa Orde Lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998), dan masa Reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi suatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitable), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.²

Dibandingkan dengan lainnya, khususnya negara maju, tentu saja keberadaan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing (PMA) di Indonesia belumlah seberapa lama. Keberadaan penanaman modal pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industri di Eropa pada 1760, khususnya di Inggris dan kemudian menjalar ke Amerika pada 1860. Sebelum meletusnya revolusi industri keadaan masyarakat sangat memprihatinkan terlebih para pekerja industri dikuasai oleh tuan tanah, apalagi kegiatan perekonomian pada waktu itu diatur secara ketat oleh negara sehingga masyarakat pada masa itu menginginkan adanya suatu struktur baru yang dapat mengikutsertakan mereka dalam kegiatan perekonomian yang telah diatur oleh negara bertahun-tahun lamanya. Hal itu pula yang menjadi alasan pertimbangan terjadinya demonstrasi dan pemberontakan para pekerja waktu itu, sehingga melahirkan sistem baru di mana masyarakat atau pihak swasta mulai diperkenankan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian negara. Dengan keikutsertaan

² Ibid, hlm 2.

pihak swasta dalam kegiatan perekonomian negara itulah menandai awal mulanya penanaman modal atau investasi dari pihak swasta ke dalam bidang industri. Pihak swasta, mulai beramai-ramai menanamkan modalnya terhadap penemuan baru yang berguna untuk menghasilkan barang konsumsi bagi masyarakat lewat pembelian dan pengadaan alat-alat produksi seperti mesin tenun, mesin pengolah bahan mentah untuk keperluan industri tekstil, dan permobilan sehingga industri dapat maju dengan pesat dan menarik pihak swasta lainnya untuk ikut pula menanamkan modalnya guna lebih memacu pertumbuhan industri. Akibat dari keadaan itu, bidang pertanian yang dahulunya menjadi sandaran utama masyarakat Inggris menjadi mundur dan akhirnya beralih dari negara pertanian menjadi industri.³

Kehadiran penanaman modal atau investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat lain, yakni nasib buruh pada permulaan dipacunya pertumbuhan industri keadaannya sangat menyedihkan. Para penanam modal seenaknya saja mendirikan pabrik baru tanpa memperhatikan syarat kesehatan kerja. Anak-anak dan wanita tanpa ada pembatasan diikutkan juga bekerja dengan waktu yang lama ditambah lagi dengan tempat kediaman para pekerja yang sangat buruk serta pendidikannya juga diabaikan, sehingga melahirkan pergerakan buruh untuk menuntut adanya perbaikan sosial para buruh.

³ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2017) hlm 4.

Dari Inggris teknik baru tersebut dialirkan ke Eropa Barat dan kemudian sampai ke Amerika. Untuk itu, maka lahirlah industri raksasa yang membutuhkan bahan mentah yang tidak sedikit jumlahnya guna kebutuhan pabrik, sehingga negara industri menjadi berlomba-lomba untuk menguasai sebanyak-banyaknya daerah atau wilayah yang menghasilkan bahan mentah dan yang sekaligus dapat pula membeli barang-barang hasil pabrik. Dari sini pula menjadi dasar lahirnya daerah jajahan serta melahirkan pula adanya perusahaan berskala besar yang melewati batas negara yang dikenal dengan nama perusahaan transnasional atau multinational corporation (MNC).

Seiring dengan kemajuan di lapangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perhubungan yang semakin singkat, tentu saja penanaman modal mengalami perkembangan yang pesat pula, apalagi setelah terjadinya Perang Dunia II di mana semua sarana dan prasarana menjadi hancur total akibat perang sehingga untuk memperbaikinya kembali diperlukan upaya penanaman modal atau investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam keadaan demikian, Amerika Serikat sebagai suatu negara yang sudah mempunyai tingkat industri yang besar dan telah mapan melancarkan su-atu rencana perbaikan terhadap Eropa dengan nama Marshall Plan guna membangun kembali Eropa yang telah hancur akibat perang melalui pelaksanaan restrukturisasi infrastruktur dengan memanfaatkan investasi langsung modal swasta Amerika yang

besar.⁴

Keberhasilan Amerika dengan proyek Marshall Plan mengakibatkan perekonomian Eropa mulai tumbuh kembali terlebih lagi dalam bidang industri. Kemampuan pihak penanam modal swasta Amerika yang dengan berani menanamkan modalnya di Eropa telah memberikan hasil yang maksimal dan bahkan bisa menyamai Amerika sendiri. Selanjutnya, Jepang mengalami hal yang sama pula dengan Eropa setelah usainya Perang Dunia II yang membawa Jepang kepada kekalahan dan juga hancurnya perekonomian, sarana, dan prasarana yang dahulunya sudah mapan. Dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki telah menyadarkan Jepang untuk memikirkan bagaimana membangun perekonomiannya yang telah porak-poranda itu.

Dalam hal ini Amerika kembali berperan dan membuat suatu rencana terhadap perbaikan perekonomian Jepang melalui suatu penandatanganan persetujuan serta pernyataan agar Jepang era pascaperang tidak lagi melakukan ekspansi militernya. Dengan dukungan dan suntikan dana yang dimotori oleh investasi langsung dari Amerika, maka Jepang secara berangsur-angsur mulai kembali membangun perekonomiannya dan menyejajarkan dirinya dengan negara industri maju bahkan menjadi negara pengeksport modal terbesar serta tingkat ekonominya paling maju dewasa ini. T. Nakamura, seorang ekonom Jepang, mencatat pengembangan industri Jepang yang disertai

⁴ Ibid, hlm5.

dengan penanaman modal swasta yang meningkat. Menurutnya, Perang Dunia I telah mengubah wajah ekonomi Jepang yang meningkat lima kali dari pertumbuhan rata-rata dan ekspornya membumbung tinggi, sehingga menjelang 1920-an, Jepang sudah menjadi negara kreditur terbesar di Asia. Namun dengan ikut terlibatnya Jepang dalam Perang Dunia II pada 1940 an, kembali perekonomian Jepang yang dahulunya sudah tertata dengan baik hancur total dan luluh.⁵

Amerika Serikat selaku kuasa pemerintah pendudukan memaksa Jepang untuk melancarkan kebijaksanaan demiliterisasi dan memaksa pula untuk melaksanakan kebijaksanaan pintu terbuka bagi penanaman modal yang datangnya dari luar, khususnya investasi asing langsung Amerika. Melalui kebijakan pintu terbuka terhadap modal asing, maka Jepang kembali mengalami masa kebangkitan perekonomiannya setelah dimulainya era perang dingin, di mana Amerika sebagai negara donor utama bagi Jepang telah berubah sikap dan dengan serentak membangun kembali perekonomian Jepang serta menjadikannya sekutu dalam dunia pasar bebas.

Meletusnya perang Korea membuat Jepang mengalami ledakan ekonomi yang menyebabkan penanaman modal swasta baik yang datangnya dari luar maupun Jepang sendiri secara besar-besaran untuk membangun pabrik dan peralatannya guna menyuplai kebutuhan dalam perang Korea tersebut. Bersamaan dengan itu pula tentara pendudukan

⁵ Ibid, hlm6.

Amerika di Jepang memerlukan pengeluaran yang besar dalam operasi mereka, sehingga akibatnya meningkatkan devisa dan memungkinkan Jepang untuk mengimpor lebih banyak lagi bahan baku guna pengembangan industri mereka.

Terhadap perkembangan Jepang tersebut, tentu segera dapat dilihat berbagai faktor yang mendukung mengapa Jepang dalam waktu singkat dapat mengembalikan perekonomiannya yang telah hancur total kepada keadaan yang stabil dan maju. Berdasar pengalaman sejarah, Jepang merupakan negara yang mengalami proses transisi dari negara yang bercorak agraris feodal ke industri modern. Hal itu disebabkan antara lain, adanya ketersediaan modal yang cukup, tingkat pendidikan umum yang relatif tinggi, akumulasi modal dan keputusan pihak pemerintah Jepang sendiri untuk memajukan modernisasi tanpa melupakan tradisi atau kebiasaannya, meskipun dengan diterimanya konsep kapitalisme oleh masyarakat Jepang yang membawa akibat perubahan pola pemikiran dari masyarakat pertanian menjadi industri.

Selain itu, tidak ialah pentingnya pula adalah peran penanaman modal khususnya penanaman modal asing (PMA) dan swasta Jepang secara besar-besaran yang merupakan tulang punggung terjadinya proses industrialisasi secara modern. Ditambah pula dengan adanya rekonstruksi pembangunan yang dilakukan pada 1951 dan kebijaksanaan pengembangan industri dari pemerintah berupa pemberian fasilitas dan bantuan selama masa resesi dengan melalui kartel, pembebasan pajak,

peningkatan kapasitas yang teratur sehingga mampu mendorong perusahaan Jepang untuk berani melakukan ekspansi usaha serta berhasil pula masuk dalam perdagangan dan distribusi dunia melalui perusahaan-perusahaan "zaibatsu" atau "shogo shosa" Jepang seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo.⁶

Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang membangun sehingga diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Oleh karena itu, isu penanaman modal asing dewasa ini semakin ramai dibicarakan karena pembangunan nasional pada dasarnya membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin tercukupi hanya dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini semakin mendorong upaya semaksimal mungkin untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Pemerintah kabupaten Demak dalam menarik investor asing tahun 2016-2021?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Demak untuk menarik investor asing tahun 2016-2021.

⁶ Ibid, hlm7

⁷ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing* (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1994), hlm 46.

D. Landasan Teori

1. Interdependency Theory

Umumnya setiap negara saling ketergantungan sama lain. Negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif masyarakat. Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye :

“Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dalam suatu negara”⁸

Interdependensi terjadi di berbagai isu, seperti ekonomi dan politik seperti perdagangan, investasi dan finansial. Transaksi perdagangan memiliki implikasi yang besar terhadap interdependensi yang berupa informasi antar pemerintah. Akan menjadi mutual dependent antar negara dalam hal barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Interdependensi akan sangat merugikan jika diputuskan hubungannya. Sektor investasi semakin tingginya kenaikan resiko bagi para aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan yang disebabkan oleh berubahnya pola investasi. Sedangkan dalam sektor politik terdapat suatu kesadaran bahwa kelangsungan hidupnya secara sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama

⁸ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya:2005).

antar negara tersebutlah yang akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masing- masing negara.

Dalam interdependensi keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama bertumpu pada dua hal, yaitu power dan kemampuan tawar menawar dan rezim internasional. Power dan kemampuan tawar menawar berkaitan dengan kondisi interdependensi yang tidak sejalan atau asimetris, karena dalam teorinya hubungan interdependensi lebih mengarah kepada hubungan timbal balik, namun pada kenyatannya hubungan yang sejalan atau simetris tersebut jarang terjadi. Kemudian, rezim internasional bertumpu pada hubungan saling ketergantungan yang tidak sejalan atau asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi politiknya dalam mencapai kesepakatan diantara mereka.⁹

E. Hipotesa

Strategi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menarik investor asing tahun 2016-2020 melalui :

- (1) *Image Marketing*, image (citra) ,
- (2) *Attraction Marketing*, Aktrasi (daya tarik),
- (3) *Infrastructure Marketing*,
- (4) *People Marketing*.

⁹ Yanuar, Ikbar. "Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori". (Bandung. PT Refika Aditama:2006).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus sebagai metodenya. Jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Studi kasus kadang melihat peneliti dengan unit terkecil seperti perusahaan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan Stake, strategi studi kasus dimaksudkan untuk mengeksplorasi suatu peristiwa, proses, aktivitas, organisasi, atau sekelompok individu sosial dan politik. Dalam konteks ini kasus yang menjadi objek penelitian dibatasi oleh waktu dan aktivitas.

Kasus adalah suatu hal yang spesifik. Kasus merupakan *bounded system*. Oleh karena itu, studi kasus memiliki keunggulan kedalaman analisis, karena sifatnya yang spesifik. Tujuan studi kasus adalah memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus, sehingga nantinya dengan pemilihan subjek yang tepat, produksi dari studi kasus akan dapat digeneralisir.¹¹ Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk

¹⁰ Umar, H. *Metodologi penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1999) hlm 23.

¹¹ L. S. Morrow & L. M. Smith. *Qualitative research for counseling psychology*. Handbook of counseling psychology, 3, 1994. 199-230. hlm 326.

mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai seseorang atau sekumpulan orang, seperti keluarga, institusi atau komunitas yang menjadi obyek penelitian.¹² sedangkan tujuan dari studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹³

Terdapat tiga tipe studi kasus yaitu *eksploratory*, *eksplanatory*, dan deskriptif. Dari ketiga tipe penelitian diatas, peneliti menggunakan tipe deskriptif.¹⁴ Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak pula menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode ini tidak berusaha menjelaskan penyebab hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Dengan kata lain, deskriptif merupakan metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.¹⁵

Lebih lanjut Bungin menjelaskan bahwa tipe deskriptif mampu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi yang timbul pada objek penelitian, kemudian menarik ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi atau situasi tertentu. Pemilihan tipe

¹² Hillway Reiner W. B. (1957). Tyrus. *Introduction to Research*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1956. 284 P. Science Education, 41(3), 242-242.

¹³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.1997.hlm 46.

¹⁴ Robert K. Yin Studi Kasus: *Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006.

¹⁵ Jalaluddin Rahmat Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009.hlm 24. 17 Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012)hlm 124.

ini didasarkan pada pemikiran bahwa tipe deskriptif mampu memaparkan mengenai berbagai pandangan, sikap, dan proses pembentukan fenomena serta permasalahannya berdasarkan pada perilaku para pelakunya yang kemudian digambarkan secara faktual.¹⁶

Untuk mengungkap upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam menarik investor asing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, maka peneliti membutuhkan banyak data melalui observasi, penelusuran dan laporan tentang apa yang telah dilakukan, apa saja hasilnya, dan apa saja yang menjadi ekspektasi DINPMPTSP Kabupaten Demak berkaitan dengan menarik investor. Pendekatan studi kasus juga memungkinkan peneliti memperoleh data-data melalui wawancara tentang strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak sebagai fungsi penanaman modal daerah dan cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak berkomunikasi dengan investor.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak yang merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengatur investasi dan

¹⁶ Bungin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

berkomunikasi dengan para investor. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak dengan para investor agar tertarik menyuntikan dananya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data diperlukan dalam penelitian ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara atau *interview*

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Wawancara secara mendalam menggunakan *interview guide* berupa daftar sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan informasi mencakup segala hal tentang objek penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Wawancara ini nantinya dilakukan kepada tiga orang pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana terdiri dari kepala Divisi Penanaman Modal, kepala Divisi Pelayanan Perizinan Terpadu, dan kepala Sub Divisi Pengawasan dan Pengendalian Modal mengenai praktik upaya menarik investor asing dan strategi berkomunikasi dengan investor.

b. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data-data

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti dokumen mengenai struktur organisasi, sejarah, aktivitas atau program, media komunikasi yang digunakan dan lain sebagainya. Sedangkan keputusan adalah pelacakan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dan diperoleh dari sumber-sumber pustaka di perpustakaan.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, atau pengkombinasian kembali data-data untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Data yang didapatkan melalui wawancara, dokumen, dan observasi akan dianalisa berdasarkan atas kerangka pemikiran yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut merupakan rumusan desain awal yang merefleksikan serangkaian pertanyaan penelitian.

Data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis *interactive models* yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis dalam penelitian ini:¹⁸

¹⁷ Robert K Yin 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996. hlm 133.

¹⁸ Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.1994

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat melalui wawancara dan dokumen. Peneliti akan mengumpulkan berbagai data mengenai profil pada DINPMPTSP Kabupaten Demak dan juga strategi komunikasi yang dilakukan dalam berhubungan dengan investor.

b. Reduksi data

Reduksi data dalam hal ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan terfokus.

c. Penyajian data

Pada tahapan ini, peneliti akan menyajikan data mengenai praktik komunikasi dan strategi komunikasi upaya menarik investor asing yang telah direduksi sebelumnya. Data akan disajikan dalam bentuk sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Dalam tahap penyajian data, peneliti akan menggunakan strategi penulisan laporan pada metode studi kasus. dalam menuliskan laporan terdapat beberapa analisis struktur yang dapat digunakan yaitu, struktur linear, komparatif, kronologis, pengembangan teori, ketegangan, dan tidak beraturan. Adapun dalam metode penulisan laporan ini, peneliti akan menggunakan struktur analisis linear.¹⁹

Struktur analisis linear merupakan bentuk standar dalam penulisan laporan, dimulai dengan penjabaran sub topik isi, persoalan atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yakni menjabarkan bagaimana bentuk atau praktik serta strategi upaya menarik investor asing yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak melalui lembaga daerahnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak.

Kemudian menjabarkan proses pengumpulan data yang didapat dengan cara mempelajari dokumen profil, kegiatan, program komunikasi dan juga melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan tadi dengan memilah-milah data dan membuang data yang dirasa tidak perlu untuk disajikan. Terakhir adalah menarik konklusi atau kesimpulan dari

¹⁹ Robert K Yin 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996. hlm169.

data yang telah dikumpulkan dan dianalisis serta menjabarkan implikasi dari penelitian ini yang disampaikan dalam bentuk saran dari peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah tulisan yang mudah dipahami dan dimiliki alur pemikiran yang masuk akal harus ditulis dengan urutan yang sesuai dengan runtutan pemikiran yang logis pula, oleh karena itu, hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Landasan Teori
- E. Hipotesa
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Umum Penanaman Modal Asing

- A. Penanaman Modal Asing di Kabupaten Demak
- B. Masalah Penanaman Modal Asing Kabupaten Demak
- C. Sejarah Pembentukan DINPMPTSP Kabupaten Demak
- D. Dasar Hukum
- E. Visi Misi DINPMPTSP Kabupaten Demak
- F. Tugas Pokok dan Fungsi DINPMPTSP Kabupaten Demak

BAB III : Upaya Pemerintah Kabupaten Demak Menarik Investor Asing

- A. Perencanaan dan Pemograman Pada Dinas Penanaman Modal dan Peyalanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak
- B. Evaluasi Strategi Marketing (DINPMPTSP) Kabupaten Demak

BAB IV : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

Gambaran Umum Penanaman Modal Asing

A. Penanaman Modal Asing di Kabupaten Demak

Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap daerah membutuhkan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Demak melibatkan masyarakat luas baik individu, pihak swasta, nasional ataupun asing untuk memenuhi kebutuhan akan modal tersebut. Keterlibatan antara pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan investasi. Investasi pada daerah dapat berupa investasi asing maupun investasi nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak sebagai pemegang kewenangan dalam bidang penanaman modal membagi tipe investasi ke dalam dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dikatakan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) apabila kegiatan penanaman modal tersebut melibatkan Warga Negara Asing (WNA) dalam pelaksanaannya. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan tipe investasi yang keseluruhan modalnya berasal dari Warga Negara Asing (WNA), namun tidak menutup kemungkinan jika terjadi kerjasama antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kegiatan investasi tersebut. Dikatakan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) juga meskipun nilai modal yang ditanamkan Warga Negara Asing (WNA) dalam sebuah kerjasama lebih sedikit dibandingkan Warga Negara Indonesia (WNI).

Berbeda dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dalam kegiatan investasinya melibatkan Warga Negara Asing (WNA) menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sebuah bentuk kegiatan investasi yang keseluruhan modalnya berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang tidak melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sama sekali, baik dalam bentuk investasi kecil, menengah, maupun besar. Sebenarnya ada satu lagi tipe investor di Kabupaten Demak yaitu investor non PMDN. Hal yang membedakan antara PMA, PMDN, dan non PMDN adalah mengenai perizinan, PMA adalah investor asing yang sudah memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investor lokal yang sudah memiliki izin prinsip yang diterbitkan oleh daerah bersangkutan, sedangkan investor non PMDN ini adalah mereka yang memiliki usaha, namun belum memiliki izin prinsip. Investor seperti ini tetap dibina dan dilatih agar mereka nantinya bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi dan sudah memiliki izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak.

Dalam menjalin hubungan dengan para investor, tidak ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak. Perbedaan terjadi hanya pada urusan pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tidak menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, melainkan menjadi kewenangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) RI di Jakarta. Pelaku Penanaman Modal Asing (PMA) harus mengurus izin prinsip penanaman modal di BKPM dahulu, kemudian setelah mendapatkan izin prinsip mereka baru membawa izin tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak untuk mengurus izin daerah yang meliputi izin lokasi, izin bangunan, izin gangguan, dan lain sebagainya.

B. Masalah Penanaman Modal Asing Kabupaten Demak

Tahapan pertama dalam merumuskan upaya pemerintah menarik investor asing adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Demak. Pentingnya mendefinisikan masalah ini akan memudahkan perumusan strategi yang tepat dengan penggunaan *marketing strategy* yang tepat pula. Dalam pendefinisian masalah ini, peneliti akan memaparkan analisis SWOT Kabupaten Demak yang mana akan melihat keunggulan dalam berinvestasi di Kabupaten Demak, kelemahan yang menjadi tolak ukur berinvestasi di Kabupaten Demak, peluang atau potensi berinvestasi di Kabupaten Demak, dan hambatan dalam berinvestasi di Kabupaten Demak.

Berikut adalah hasil analisa SWOT yang telah dilakukan:

B.1 Keunggulan dalam Berinvestasi di Kabupaten Demak

Kabupaten Demak, termasuk lahan subur untuk berinvestasi. Dengan UMK tertinggi kedua se-Jateng setelah Semarang, menandakan daya beli masyarakatnya pun tergolong tinggi. Dengan daya beli yang

tinggi akan mempengaruhi permintaan barang dari industri setempat. Ini menjadikan daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Kabupaten Demak sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Sedangkan untuk infrastruktur khususnya jalan, jalur kabupaten sudah dirasa baik. Hampir 90 persen lebih jalan kabupaten bisa diakses. Ketersediaan infrastruktur pada suatu daerah sangat penting, untuk dapat menarik investor asing melakukan investasi pada daerah tersebut sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Disinilah letak pentingnya *infrastructure marketing* bagi pemerintah Kabupaten Demak.

Demak juga sudah ditetapkan sebagai kantong industri di Jateng, diikuti dengan pengembangan kawasan industri. Penetapan sebagai kantong industri di Jateng diharapkan mampu membawa citra positif yang akan menarik para investor asing. Disinilah letak pentingnya *image marketing* bagi pemerintah Kabupaten Demak.

B.2 Kelemahan Berinvestasi di Kabupaten Demak

Mahalnya tenaga kerja bagi investor, upah buruh cukup tinggi, sehingga menjadi beban produksi yang berat, terlebih sebagian industri yang ada adalah padat karya (*labor intensive*). Mahalnya upah tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan investor asing untuk menanamkan modalnya di Demak. Padahal, momentum realokasi investasi berbagai negara dari China merupakan peluang saat ini. Tidak dipungkiri bahwa upah buruh merupakan alasan terbesar investasi Indonesia tidak kompetitif

dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Selain itu investor asing yang ingin masuk ke Kabupaten Demak menghadapi banyak pertimbangannya, mulai dari kemudahan perizinan, hingga ketersediaan infrastruktur seperti air bersih. Demak dikenal sebagai kabupaten yang minim sumber air bersih, bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat masih mengalami kekurangan.

Kemudian jika dilihat dari faktor alam, persoalan rob menjadi masalah tersendiri. Investor asing harus berpikir ulang untuk menanamkan dananya di Kabupaten Demak ketika dihadapkan oleh masalah ini. Untuk itulah ada pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk membuat pengusaha betah dan mau terus menanamkan modalnya. Seberapa pun besarnya investasi yang mereka lakukan, pengusaha itu berjasa untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Itulah tanggung jawab yang sebenarnya melekat pada pemerintah, yakni menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga. Yang dibutuhkan pengusaha untuk menanamkan modalnya ialah kepastian.

Di Kawasan Industri PT Jawa Tengah Lahan Andalan atau *Jatengland* di Sayung, Demak misalnya, sejak dibuka pada 2013 lalu hingga kini relatif minim peminat, dan baru diisi tiga perusahaan. Marketing Communication PT Jawa Tengah Lahan Andalan, Rini Arifiani mengungkapkan, sampai akhir 2020 total lahan pengembangan tahap pertama di kawasan industri Jatengland mencapai luas 110 hektare. Tetapi hingga kini baru 35 hektare yang sudah terjual.

B.3. Peluang atau Potensi Berinvestasi di Kabupaten Demak

Kemudahan pengurusan perizinan usaha serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya, bukti bahwa pemerintah kabupaten Demak benar-benar pro investasi. Perizinan dilaksanakan untuk memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Perizinan menjadi satu hal yang krusial untuk dipenuhi guna melaksanakan berbagai jenis usaha. Perizinan juga menjadi landasan bagi terlaksananya kegiatan investasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah. Sedangkan Produk Domestik Bruto merupakan indikator yang dipakai mengukur pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sektor industri pengolahan di Demak pada dasarnya mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan. Kontribusi terhadap PDRB mencapai 29,63 persen (2019), tertinggi dibandingkan dengan sektor lain, pertanian (24,28 persen), dan perdagangan (15,65 persen).

Ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara itu berarti berjalan secara tidak efisien bisa dikatakan seperti itu. Besarnya biaya-biaya yang terbilang sangat tinggi bisa berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya

saing dikarenakan biaya tersebut. Dengan munculnya ketidakadilan sosial misalnya juga bisa menjadi salah satunya. Pastinya sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan ataupun susah anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah dan terbilang cukup mahal. Pembangunan jalan tol tanggul rob Semarang-Demak akan segera dimulai pembangunannya pada tahun ini. Rencananya, jalan tol yang juga akan menjadi tanggul rob ini akan rampung pada 2022.

B.4. Hambatan dalam Berinvestasi di Kabupaten Demak

Tanpa kegiatan investasi tidak ada produksi, tanpa kegiatan produksi tidak ada ekspor. Dengan ekspor yang rendah dan sebagian hasil ekspor disimpan di luar negeri, Indonesia minim devisa. Dalam kondisi minim devisa, rupiah akan mudah menjadi bulan-bulanan seperti yang dialami Indonesia saat ini. Kabarnya investasi di Demak berkembang lambat bukanlah karena permasalahan baru. Diindikasikan belum ada persamaan visi antara pembuat kebijakan dan investor. Contohnya dalam hal perizinan, ada bidang layanan satu pintu tapi praktiknya belum mampu memberikan pelayanan secara cepat.

Oleh karena itu, mulai hari ini, perizinan sebagai bagian dari persyaratan investasi harus dipermudah. Kemudahan perizinan jangan lagi sekadar slogan, melainkan sungguh-sungguh direalisasi. Selain mudah, proses perizinan juga harus mampu mencegah terjadi *kongkalikong* yang berujung suap. Para pelaku bisnis pasti lebih senang

tidak “dipaksa” menyuap andaikan semua peraturan sudah terang-benderang dan proses perizinan berjalan cepat.

Selain itu hampir sebagian besar lahan di Demak dikuasai pihak ketiga. Sehingga, tak heran dengan argumen Apindo Jateng yang menyebut lahan di Demak penuh dan tak mampu lagi menampung investor. Jika pun ada, harganya melambung tinggi di luar kewajaran. Lahan industri di Kecamatan Sayung misalnya, ternyata dikuasai kelompok tertentu, hanya saja kurang bisa memanfaatkan, hanya mengurus izin area industri. Lahan dikuasai tapi tidak bisa menghadirkan investor, mungkin karena harga lahan dipatok terlalu mahal.

Demak berlokasi cukup dekat dengan daerah lain yang juga daerah basis industri seperti Kabupaten Semarang, Kendal, maupun Kudus, sehingga persaingan menarik investor sangat kompetitif. Permasalahan ini akan menjadi penghambat investasi jika tidak diikuti dengan jemput bola investor. Kawasan industri menjadi langkah cepat untuk menarik investasi di Demak selain itu juga perlu diciptakan kompetisi antar daerah dalam menarik investasi melalui kawasan industri khusus.

C. Sejarah Pembentukan DINPMPTSP Kabupaten Demak

Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih menjadikan segala aktivitas yang dilakukan menjadi lebih mudah. Dengan alasan tersebut, kualitas pelayanan publik dituntut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Demak berusaha untuk membentuk pelayanan publik yang

responsif dan cepat, terutama dalam menangani investor dan investasinya di daerah.

Sejarah awal terbentuknya DINPMPTSP diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA), melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Wilayah Kabupaten Demak.

Sesuai dengan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik maka bentuk kelembagaannya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak ditingkatkan kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu lembaga teknis daerah

yang memiliki kewenangan dalam mengurus dan memberikan pelayanan perizinan kepada investor yang ingin membuat atau mengembangkan usahanya di Kabupaten Demak. PTSP melakukan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, mempunyai komitmen yang kuat untuk memuaskan kebutuhan semua *stakeholder* dengan mengimplementasi sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pelayanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu yang cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien, serta peningkatan kinerja berkelanjutan dengan prinsip TERDEPAN.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

3. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menjalankan tugasnya dalam promosi potensi investasi kepada investor, berhubungan dengan investor dalam pelayanan perizinan dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian realisasi investasi di Kabupaten Demak.

E. Visi Misi DINPMPTSP Kabupaten Demak

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengurus persoalan investasi di daerah, DINPMPTSP mempunyai visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis”

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki beberapa poin yang harus mereka lakukan yang tertuang dalam misi DINPMPTSP Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi di bidang penanaman modal

melalui teknologi

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearah aparatur yang profesional, jujur dan akuntabel
3. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi
4. Mendorong iklim investasi yang lebih proaktif dan berdaya saing
5. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Investasi Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan moto DINPMPTSP Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:
 “Kepuasan Pelanggan Adalah Tujuan Kami”

Sedangkan janji layanan DINPMPTSP Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

“Kami Siap Memberikan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal "Terdepan"

Sedangkan maklumat perizinan DINPMPTSP Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standard Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila tidakMenepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku”

F. Tugas Pokok dan Fungsi DINPMPTSP Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Demak Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016
 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mengatakan bahwa DINPMPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti mampu menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Demak menarik investor asing, melalui

- (1) *Image Marketing*, citra Pemerintah Kabupaten Demak telah berusaha membentuk brand image melalui 3 komponen yaitu citra pemerintah Kabupaten Demak membuat kebijakan unggulan untuk menarik investor dengan memberikan pelayanan satu pintu dan terpadu, citra pemakai, dan citra produk.
- (2) *Attraction Marketing*(daya tarik) melalui kelembagaan, kondisi sosial polti, ekonomin daerah, dan tenaga kerja produktivitas.
- (3) *Infrastructure Marketing*, pemerintah Kabupaten Demak sebgai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur.
- (4) *People Marketing*.dengan memasarkan daerah melalui Bupati, Kepala Dinas, pegawai yang kompeten, dan sikap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti adalah:

Saran untuk Akademis :

Bagi peneliti yang ingin melanjutkan diharapkan mengkaji ulang

penanaman modal asing di Kabupaten Demak yang saya teliti karena masih ada banyak kekurangan yang saya dapat misalnya harus ke BAPPEDA untuk mendapatkan info mengenai pembangunan daerah setempat, kemudian ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Aminuddin Ilmar.(2017). Hukum Penanaman Modal di Indonesia .Jakarta, Kencana.

Bungin, Burhan. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

David Kairupan.(2013).Aspek Hukum Penanaman Modal Asing .Jakarta, kencana.

Freddy, R. (2009). Strategi Promosi yang kreatif. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoro, Mudrajat.(2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Surabaya: Erlangga. Lewis, W. A. . Development Economics in the 1950s. ICS Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. (1997). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Pandji Anoraga.(1994) .Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.

- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. (2005).
“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2001). Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
- Umar, H. (2003). Metodologi penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Yanuar, Ikbar. (2006). “Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori”.
Bandung. PT Refika Aditama.5
- Yin, Robert K. (1996). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Sumber Jurnal :

- Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing The
Intention To Stock Investment Among Muslim Investors In Langsa. Share: Jurnal
Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Morrow, S. L., & Smith, M. L. (2000). Qualitative research for counseling
psychology. Handbook of counseling psychology, 3, 199-230.
- Reiner, W. B. (1957). Hillway, Tyrus. Introduction to Research. Boston:
Houghton Mifflin Company, 1956. 284 P. Science Education, 41(3), 242-242.